

**ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP
KEDAULATAN RAKYAT**

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Wita Devi Anjari

201710110311456

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP
KEDAULATAN RAKYAT**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Wita Devi Anjari

201710110311456

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

WITA DEVI ANJARI

201710110311456

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Sumali, SH., M.Hum

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, positioned to the right of their respective names.

**ANALISIS PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEDAULATAN
RAKLYAT**

Diajukan Oleh:

WITA DEVI ANJARI

201710110311456

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,

Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Ketua Program Studi,
Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : WITA DEVI ANJARI

NIM : 201710110311456

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEDAULATAN
RAKLYAT

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 02 Agustus 2024



Wita Devi Anjari

Ungkapan Pribadi

“Aku Telah Melimpahkan kepadamu Kasih Sayang yang datang kepadaku, Dan supaya Kamu diasuh di bawah Pengawasanku”

(Qs. Thaha: 39)

“Tetapi orang yang Bersabar dan Memaafkan, Sesungguhnya (Perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan”

(Qs. As-Syuura: 43)



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat”. Selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, pengarahan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Almarhumah Mama, Ayah, Terima kasih atas dukungan, kesabaran, toleransi serta segalanya yang telah diberikan dan dikorbankan, terima kasih atas dpa yang tidak pernah putus, terima kasih atas kepercayaannya untuk melanjutkan gelar sarjana ini.
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, atas segala sarana dan prasarana guna menunjang proses kuliah berlangsung.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memfasilitasi mahasiswa untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum.
4. Cholidah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan fasilitas kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir.

5. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberi bimbingan, petunjuk dan instruksi kepada penulis hingga selesainya tugas akhir ini.
6. Fitria Esfandiari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah melakukan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, petunjuk, dan instruksi kepada penulis hingga selesainya tugas akhir ini.
7. Aslin, Fransiska mega, Deri Prayoga, Muklis efendi, Aprilia Kartini, Vira novita, Hilda elfina andany, Terima kasih untuk semua bantuan yang telah kalian berikan.
8. Bapak khalid saleh bahmid S.H., M.Kn terima kasih atas kesempatan dan toleransi untuk melanjutkan Pendidikan ini sampai di titik ini.

Saya berharap semoga Allah SWT mengaruniakan rahmat dan hidayah kepada mereka semua.

Malang, 25 Juni 2024

Wita Devi Anjari

ABSTRAKSI

Nama : Wita Devi Anjari

NIM : 201710110311456

Judul : Analisis Yuridis Presidential Threshold Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat

Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum

2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Pemilihan umum merupakan konsekuensi dari sebuah negara demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip negara demokrasi telah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip kedaulatan rakyat prinsip tersebut melahirkan pemilu yang demokratis Namun dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden terdapat *Presidential threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang telah diatur dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur bahwa syarat 20% perolehan kursi DPR dan 25% suara sah secara nasional telah memicu banyak pro dan kontra. Penulis merumuskan dua rumusan masalah *Pertama* bagaimana Presidential threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hukum Postif di Indonesia. *Kedua* Implikasi Hukum Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Prespektif Prinsip Kedaulatan Rakyat. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menguraikan *Presidential threshold*, dalam hasil pembahasan penulis berkesimpulan bahwa keberadaan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan hukum positif di Indonesia dimana dalam konstitusional yaitu tidak diatur dan tidak dijelaskan mengenai ambang batas tetapi peraturan mengenai ambang batas di atur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga prinsip kedaulatan rakyat tidak berjalan baik hak rakyat menjadi hilang, hak partai politik menjadi hilang hal tersebut tentu membuat lemah kedaulatan rakyat. Penulis menyarankan agar ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dihilangkan sebagai salah satu bentuk penguatan demokrasi.

Kata kunci: *Presidential threshold*, pemilihan umum, kedaulatan rakyat

ABSTRACT

Nama : Wita Devi Anjari

NIM : 201710110311456

Judul : Juridical Analysis of the Presidential Threshold in the Election of President and Vice President from the Perspective of the Principle of Popular Sovereignty

Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum

2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

General elections are a consequence of a democratic country as regulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The principle of a democratic country has been built and developed according to the principle of popular sovereignty. This principle gives birth to democratic elections. However, in the election of President and Vice President there is a Presidential threshold or The threshold for candidacy for President and Vice President which has been regulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections has stipulated that the requirement of 20% of DPR seats and 25% of valid votes nationally has triggered many pros and cons. The author formulates two problem formulations. *First*, what is the presidential threshold in the election of President and Vice President in positive law in Indonesia. *Second*, Implications of Presidential Threshold Law in the Election of President and Vice President from the Perspective of the Principle of Popular Sovereignty. The author uses normative juridical research methods to describe the Presidential threshold, Indonesia is a democratic country and has declared itself as a people's sovereign country as written in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on this, the author uses the principle of popular sovereignty as an analysis tool for the application of the Presidential threshold in Indonesia. In the results of the discussion, the author concludes that existence of the threshold for nominations for President and Vice President is contrary to positive law in Indonesia, which is constitutional, namely that it is not regulated and does not explain the threshold. The author concludes that the existence of a threshold for nominations for President and Vice President is not in line with the principle of popular sovereignty and the people's right to have many alternative candidates for President and Vice President is lost. The author suggests that the threshold for nominations for President and Deputy President as regulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections be abolished as a form of strengthening democracy.

Key words: Presidential threshold, general election, popular sovereignty.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
E. Kegunaan Penelitian.....	22
F. Metode Penelitian.....	22
G. Analisa Bahan Hukum	26
H. Sistematika Penelitian	26
BAB II.....	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Prinsip Kedaulatan Rakyat.....	28
1. Pengertian Kedaulatan Rakyat	28
2. Tujuan Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi	36
3. Pembatasan-Pembatasan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi	39
4. Model model Demokrasi	41

5.	Partisipasi Rakyat Dalam Negara Berkedaulatan Rakyat	44
6.	Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Indonesia.....	48
B.	Teori Pemilihan Umum.....	48
1.	Pengertian Pemilu.....	52
2.	Asas-asas Pemilu	53
3.	Prinsip Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	55
4.	Tujuan Pemilihan Umum	55
5.	Fungsi Pemilihan Umum.....	56
6.	Pemilihan Umum Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat.....	56
C.	Teori Presidential Threshold	59
a)	<i>Presidential threshold</i> berdasarkan UUD NRI 1945	65
b)	Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008	66
c)	Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum	66
d)	<i>Presidential threshold</i> dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	66
BAB III	71
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A.	<i>Presidential Threshold</i> pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hukum positif di Indonesia	71
B.	Implikasi Hukum <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat	85
1.	Prinsip Kebebasan	85
2.	Prinsip Persamaan atau Kesetaraan	87
3.	Prinsip Suara Mayoritas	87
4.	Prinsip Pertanggungjawaban	89
BAB IV	92

PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	96



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aidul Fitriadi Azhari. 2005. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta. Penerbit Universitas Muhammadiyah.
- Al-Fatih, Sholahuddin. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. (Malang. Universitas Muhammadiyah Malang)
- Al-Fatih, Sholahuddin. 2022. *Hukum Pemilu dan Threshold (dinamika perkembangan di Indonesia)*. (Malang. Universitas Muhammadiyah Malang)
- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2008. *Pancasila Demokrasi, HAM, dan masyarakat*. Madani. Penerbit PT. Predana Media Group
- Affan Gafar, *Politik Indonesia. Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000)
- Ansori, Lutfil “Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol.4 No.1,2017
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999) Hlm.70
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta. Penerbit Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ctk. Keempat. PT. Raja Grafindo Persada
- Koiroodin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bee. Media Indonesia, Jakarta 2007.
- Mawardi, *Presidensial Threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk Penguatan System Presidensial*. Yogyakarta. FH UII PRESS.
- Miftah Thoha. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Prenadamedia Group.

- Munir Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta. Penerbit PT Refika Aditama.
- Moh. Kusnardi dan Haimailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: 1981. Pusat Studi HTN UI) Hlm. 328
- Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2007)
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2010)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)*. (Jakarta: 2014, Rajawali Pers) Hlm. 118
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokratis*, BumiAksara Jakarta, 2006
- Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusa Media, Malang, 2007
- Sulardi, 2009. *Redormasi Hukum Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Demokrasi*, Malang. Penerbit: In-TRANS Publishing
- Strong, C.F, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Bandung, 2004

JURNAL DAN SKRIPSI

- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan rakyat dalam penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif" *Jurnal Konstitusi*, Vol.7.2020
- Lutfi Ansori, "Telaah Terhadap Presidensial Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Yuridis* Vol.4 No.1 Juni 2017: 15-25 Hlm.19
- Muhammad Rizal. "Presidential Threshold 20% ditinjau menurut Prinsip Demokrasi" 2021.
- Takhasasu Adkha, Skripsi "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia" (Magelang: UMM: 2019).
- Alvino Bimo Sayogo, "Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat" Universitas Brawijaya. 2018

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

INTERNET

KOMPAS TV. Zainal Arifin Mochtar”Pakar Hukum; Presidensial Threshold Tidak Perlu Ada-ROSI” <https://youtu.be/Yjlr6LQgvC4>.

<https://Salamadian.com/Lembaga-Legislatif-Yudikatif-Eksekutif>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2004

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : WITA DEVI ANJARI

Nim : 201710110311456

Dengan Judul Skripsi :

" analisis presidential threshold pada pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2024



[Handwritten Signature]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum